

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
KELAUTAN DAN PERIKANAN, SERTA PANGAN)**

---

---

Tahun Sidang : 2015-2016  
Masa Persidangan : III  
Rapat Ke- : 14  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Perkebunan  
Kementerian Pertanian dan Direktur Utama PT.Perkebunan Nusantara  
I s.d. XIV  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Senin, 1 Februari 2016  
Waktu : 14.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta  
Acara : Membahas mengenai swasembada pangan  
Ketua Rapat : Viva Yoga Mauladi, M.Si.  
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo  
Hadir : A. 31 Anggota dari 50 Anggota Komisi IV DPR RI  
B. Hadir Perum BULOG:  
1. Ir.Gamal Nasir, MS. (Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian  
Pertanian);  
2. Abdul Mukti Nasution (Direktur Utama PT.PN I);  
3. Bagas Angkasa (Direktur Utama PT.PN III);  
4. Memed Wiramihardja (Direktur Utama PT.PN IV);  
5. Amal Bkti Pulungan (Direktur Utama PT.PN V);  
6. Iskandar Sulaiman (Direktur Utama PT.PN VI);  
7. Kusmandaru, NS. (Direktur Utama PT.PN VII);  
8. Dadi Sunardi (Direktur Utama PT.PN VIII);  
9. Hery Triyantno (Direktur Keuangan PT.PN IX);  
10. Subiyono (Direktur Utama PT.PN X);  
11. Budi Adi Prabowo (Direktur Utama PT.PN XI);  
12. Irwan Basri (Direktur Utama PT.PN XII);  
13. Nurhidayat (Direktur Utama PT.PN XIII); dan  
14. Budi Hidayat (Direktur Utama PT.PN XIV);  
beserta jajarannya.

## I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dan Direktur Utama PT.Perkebunan Nusantara I s.d. XIV membahas mengenai pencapaian swasembada pangan, pada hari Senin tanggal 1 Februari 2016, dibuka pukul 14.00 WIB oleh Ketua Rapat Viva Yoga Mauladi, M.Si. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi teknis terhadap PT.Perkebunan Nusantara I s.d. XIV untuk kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem tata kelola lahan perkebunan dan penugasan yang dikelola BUMN Perkebunan, sehingga diharapkan ke depan dapat lebih meningkatkan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar dan mewujudkan pengelolaan lahan perkebunan yang berdaya guna dan lestari.
2. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk menstabilkan harga kelapa sawit, karet, dan teh rakyat sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan berkaitan dengan perlindungan terhadap resiko harga komoditas perkebunan rakyat.
3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk meninjau ulang Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit karena tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, baik untuk pola pungutannya yang belum memberikan rasa keadilan terhadap perkebunan rakyat, maupun dalam memberikan manfaat terhadap pemberdayaan perkebunan rakyat.
4. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk serius membantu peningkatan kinerja PT.Perkebunan Nusantara I s.d. XIV melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam rangka mempercepat terwujudnya Kemandirian Pangan Nasional.
5. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk menambah areal kawasan pengelolaan PT.Perkebunan Nusantara I s.d. XIV dari kawasan kehutanan melalui alih fungsi yang tidak mengganggu kelestarian hutan, dalam rangka mendukung pencapaian swasembada gula dan pangan strategis lainnya.
6. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam proses perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT.Perkebunan Nusantara I s.d. XIV agar tidak bermasalah di dalam keberlanjutan pengelolaannya.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.40 WIB.

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN,

Ttd.

**IR. GAMAL NASIR, MS.**

KOMISI IV DPR RI  
KETUA RAPAT,

Ttd.

**VIVA YOGA MAULADI, M.SI**  
**A-493**

